ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks: Crossref, Dimensions, Garuda, Google Scholar, Moraref, Base, OneSearch, etc.

https://doi.org/10.58578/alsys.v3i1.766

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SMP NEGERI 5 PADANG PANJANG

Hendra Susanti[1];. Fadriati[2]; Iman Asroa. B.S[3]
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
hendrasusantismpn5@gmail.com ; fadriati@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and describing the problems of implementing the independent curriculum that occurred at SMPN 5 Padang Panjang. This research departs from the background of the many phenomena surrounding the implementation of the independent curriculum and various policies regarding the independent curriculum. The research question raised is how the problems of implementing the independent curriculum at SMPN 5 Padang Panjang are problematic. The research was conducted with a qualitative type of field research. Data was collected by interviewing school principals, curriculum representatives, and teacher councils as well as making observations at SMPN 5 Padang Panjang. The results of these interviews were analyzed and then presented in a descriptive form. The results of this analysis can answer the questions formulated in the research questions. The results of this analysis are in the form of problems in the implementation of the independent curriculum originating from the government in the form of less than optimal guidance and assistance in the implementation of the independent curriculum. In addition, there are also problems originating from teachers in the form of a lack of teacher ability to utilize independent teaching platforms and utilize technology to learn and understand independent curriculum.

Keywords *: Problems; Implementation; Independent Curriculum*

Abstrak : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjabarkan problematika pengimplementasian kurikulum merdeka yang terjadi di SMPN 5 Padang Panjang. Penelitian ini berangkat dari latar belakang banyaknya terjadi fenomena seputar implementasi kurikulum merdeka serta berbagai kebijakan mengenai kurikulum merdeka. Pertanyaan penelitian yang dimunculkan adalah bagaimana problematika implementasi kurikulum merdeka di SMPN 5 Padang Panjang. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian lapangan secara kualitatif. Data dikumpulkan dengan mewawancarai kepala sekolah, wakil kurikulum, dan majelis guru serta melakukan pengamatan di SMPN 5 Padang Panjang. Hasil dari wawancara ini dianalisis dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari analisis ini dapat manjawab pertanyaan yang dirumuskan pada pertanyaan penelitan. Hasil dari analisis ini berupa adanya problematika dalam implementasi kurikulum merdeka yang berasal dari pemerintah berupa kurang maksimalnya pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Selain itu, ada juga problematika yang berasal dari guru berupa kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan platform merdeka mengajar dan memanfaatkan teknologi untuk mempelajari dan memahami kurikulum merdeka.

Kata Kunci : Problematika; Implementasi; Kurikulum Merdeka

Jurnal AlSys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia tergolong cukup menarik untuk diteliti, terutama perihal kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Kurikulum di Indonesia pertama kalinya dibuat pada tahun 1947, dua tahun setelah Indonesia merdeka dengan nama "Rentjana Pelajaran 1947" (Alhamuddin, 2014; Insani, 2019). Hingga saat ini, kurikulum pendidikan di Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan. Sebelum ditetapkannya Kurikulum Merdeka Belajar pada 10 Desember 2019 (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022), kurikulum pendidikan di Indonesia mengguanakan kurikulum 2013. Pada saat pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2019 akhir, Indonesia berada dalam keadaan krisis yang juga berpengaruh besar pada sektor pendidikan. Pendidikan di Indonesia kala itu mengalami penurunan kualitas karena proses pembelajaran yang semula diadakan secara tatap muka, dialihkan menjadi daring dengan menggunakan berbagai aplikasi media sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, sistem pembelajaran daring ini terus ditingkatkan oleh pemerintah. Lembaga pendidikan di berbagai daerah mulai meningkatkan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring seperti *Zoom Cloud Meeting*, *Google Meeting*, *Goggle Classrom*, dan sebagainya. Walaupun demikian, keadaan ini hanya mengurangi dan meminimalisir krisis yang terjadi pada sektor pendidikan dan belum bisa menghilangkan krisis tersebut 100%.

Mengacu pada krisis pendidikan ini, Kemendikbudristek bersama pemerintah RI mengeluarkan berbagai wacana dan kebijakan untuk memulihkan pendidikan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum baru dengan nama Kurikulum Merdeka Belajar. Peluncuran kebijakan-kebijakan kurikulum merdeka dilakukan pada masa pandemi *covid-19* di Indonesia (Evy Ramadina, 2021). Kebijakan ini memberikan angin segar kepada para pengampu kepentingan pendidikan. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang disusun untuk memulihkan kondisi krisis pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, perubahan terhadap kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka belajar merupakan wujud penyempurnaan dari kurikulum 2013 itu sendiri (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022).

Pengimplementasian kurikulum merdeka dilandasi oleh bebepa dasar hukum berupa Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022, serta Keputusan kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 tahun 2022 dan Keputusan kepala BSKAP No.009/H/KR/2022

tahun 2022 (Nuraini et al., 2022). Berbagai landasan hukum ini menjadi acuan dan pegangan dalam melaksanakan kurikulum merdeka bagi setiap lembaga pendidikan pada tingkat pra, dasar, dan menengah.

Implementasi kurikulum merdeka belajar secara karakteristiknya berbeda dengan kurikulum yang pernah berlaku sebelumnya di Indonesia. Implementasi kurikulum merdeka belajar lebih berfokus pada kegiatan praktik dalam bentuk proyek yang bertemakan penguatan profil pelajar pancasila dan penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa (Sudarto et al., 2021). Selain itu, pembelajaran pada kurikulum merdeka juga dilaksanakan secara berdiferensiasi (Aprima & Sari, 2022). Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran pada kurikulum merdeka yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan, bakat dan minat siswa. Proses pembelajaran pada kurikulum merdeka mengacu pada pembentukan profil pelajar pancasila yang bertujuan menghasilkan lulusan yang bernilai karakter tinggi (Rahayu et al., 2021).

Implementasi kurikulum merdeka di SMPN 5 Padang Panjang dilakukan pada level 2, yakninya pada kriteria mandiri berubah. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala SMPN 5 Padang Panjang pada saat observasi lapangan. Hal ini dilakukan atas rekomendasi dari pengawas dan dinas pendidikan dan kebudayaan di masyarakat. Kepala SMPN 5 Padang Panjang dan Wakil Kepala Bagian Kurikulum menyampaikan bahwa secara umum, sosialisasi terhadap kurikulum merdeka ini sudah dilakukan pemerintah melalui berbagai informasi via internet. Pemerintah telah menyediakan situs dan aplikasi khusus berupa platform merdeka mengajar agar dapat digunakan oleh lembaga pendidikan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Akan tetapi, usaha pemerintah ini masih dinilai kurang maksimal dalam hal sosialisasi dan memperkenalkan kurikulum merdeka kepada lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

Kekurangan ini menyebabkan berbagai kendala yang terjadi pada setiap lembaga pendidikan, terkhususnya yang ada di Padang Panjang. Berbagai kendala yang terjadi juga beragam tergantung lembaga pendidikan masing-masing. Hal ini juga disebabkan oleh berbagai perbedaan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tingkat sekolah pra, dasar, dan menengah. Kendala-kendala ini menjadi problematika dan dilemma bagi beberapa lembaga pendidikan untuk melaksanakan kurikulum merdeka belajar.

Problematika merupakan suatu masalah yang butuh penyelesaian dan tidak dapat diselesaikan. Problematika terjadi karena adanya perbedaan dan kesenjangan antara fakta apa yang terjadi dilapangan dengan apa yang seharusnya terjadi secara idealnya atau secara seharusnya. Kesenjangan ini nantinya akan menghasilkan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan agar tidak lagi menjadi masalah. Secara umum, problematika terbagi menjadi dua, yaitu: problematika sederhana dalam skala kecil dan tidak memiliki sangkut paut dengan problematika lainnya dan problematika sulit yang saling berkaitan dengan dengan problematika lainnya dan bahkan dapat menimbulkan problematika baru (Efendi et al., 2018).

Problematika dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang muncul dari implementasi kurikulum merdeka karena adanya ketidaksesuaian keadaan lapangan dengan keadaan yang seharusnya. Secara idelanya, pengimplementasian kurikulum merdeka haruslah memiliki panduan, kejelasan, sosialisasi, pendampingan, pembimbingan serta pengarahan yang penuh dari pihak pemerintah. Jika ini sudah dilakukan secara menyeluruh, maka problematika mengenai implementasi kurikulum merdeka tidak muncul kepermukaan, atau setidaknya dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (Lestari et al., 2020). Implementasi kurikulum merdeka merupakan pelaksanaan kurikulum merdeka yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang disusun dengan tujuan untuk pemulihan pendidikan di Indonesia yang sempat merosot pada saat pandemi Covid-19. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan maisng-masing siswa secara individu. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran dilakukan dengan cara merdeka guru dan merdeka siswa. Maksudnya adalah, siswa merdeka karena dapat mengikuti pelajaran dan materi yang seusai dengan kebutuhan dan perkembangan potensinya, sedangkan guru merdeka dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa.

Berdasarkan penjabaran di atas, pertanyaan penelitian yang dapat dimunculkan adalah bagaimanakah problematika pengimplementasian kurikulum merdeka di SMPN 5 Padang Panjang? problematika yang dimaksudkan bukan hanya dari segi kepala sekolah, wakil kurikulum dan guru saja, tetapi juga dari segi siswa yang mengikuti pembebelajaran pada kurikulum merdeka. Berangkat dari pertanyaan penelitian ini, dapat dirumuskan tujuan penelitian untuk mengetahui dan memaparkan kendala yang menjadi problematika bagi SMPN 5 pada pengimplementasian kurikulum merdeka.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data penelitian. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan observasi (pengamatan) di SMPN 5 Padang Panjang. Selain itu, data penelitian juga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, serta majelis guru di SMPN 5 Padang Panjang. Hasil observasi dan wawancara ini dianalisis dan mengaitkannya dengan penelitian-penelitian yang relevan. Hasil analisis data dijabarkan secara deskriptif pada bagian pembahasan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa ada beberapa problematika terkait implementasi kurikulum merdeka yang menjadi dilema bagi SMPN 5 Padang Panjang. Dilemma ini dialami oleh kepala sekolah, wakil kurikulum dan majelis guru yang ada di SMPN 5 Padang Panjang, terkhususnya bagi guru yang mengajar pada jenjang kelas tujuh. Diantara kendala yang menjadi problematika tersebut adalah kurnag maksimalnya sosialisasi pemerintah terhadap implementasi kurikulum merdeka saat ini. Hal ini dijelaskan oleh kepala sekolah dan wakil kurikulum SMPN 5 Padang Panjang. Mereka merasa pemerintah kurang mendampingi dan mengiringi lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada masing-masing lembaga pendidikan. Hal ini lah yang menyebabkan keterlaksanaan kurikulum merdeka pada berbagai lembaga

pendidikan, terkhususnya di SMPN 5 Padang Panjang menjadi kurang maksimal.

Selanjutnya problematika yang terjadi di SMPN 5 Padang Panjang berupa kurang jelasnya panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurut guru IPS kelas 7 yang ada di SMPN 5 Padang Panjang, fasilitas belajar mandiri bagi guru berupa platform merdeka mengajar dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Adapun panduan dalam peraturan menteri yang beredar dinilai masih terlalu umum untuk dikembangkan oleh guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Kendala lain yang menjadi problematika berupa pelaksanaan asesmen diagnostik pada awal penerimaan siswa baru yang belum maksimal. Hal ini dijelaskan oleh wakil kurikulum bahwa asesmen diagnostik yang dilaksanakan hanya untuk mengetahui gaya belajar siswa saja, tetapi belum dilaksanakan untuk mengukur aspek lainnya untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Hal ini juga dijelaskan oleh salah seorang guru PAI di SMPN 5 Padang Panjang bahwa asesmen diagnostik ini belum maksimal dilaksanakan karena belum sesuai dengan tuntunan asesmen diagnostik pada kurikulum merdeka yang bertujuan untuk mengukur kesulitan belajar siswa yang dinilai dari berbagai aspek.

Wakil kurikulum juga menjelaskan bahwa secara umum, guru-guru yang ada di SMPN 5 Padang Panjang, terkhsusnya kelas 7 masih cukup sulit menerima perubahan dan menyamakan persepsi mengenai implementasi kurikulum merdeka di sekolah mereka. Oleh karena itu, guru-guru yang mengajar di kelas 7 kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan pada gaya belajar, tingkat kemamapuan siswa serta kesulitan belajar yang dialami oleh siswa.

Kendala selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dalam pelaksanaan proyek. Hal ini dijelaskan oleh wkail kurikulum bahwa proyek yang dilaksanakan masih bersifat abu-abu. Maksudnya, pelaksanaan pembelajaran proyek yang sebenarnya tidak bisa diukur secara pasti karena keterlibatan semua guru mata pelajaran dalam melaksanakan proyek. Guru IPS dan guru PAI juga menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek ini juga menyebabkan kebingungan bagi beberapa guru. Hal ini dikarenakan tidak seluruh tema yang tersedia bisa dilaksanakan dengan mengintegrasikan seluruh guru mata pelajaran. Sebagai contoh, proyek pertama yang dilakukan oleh SMPN 5 Padang Panjang adalah proyek jejak karbon dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Proyek ini lebih identik kepada guru IPA. Sedangkan guru-guru lainnya seperti guru IPS dan guru bahasa Inggris menyampaikan bahwa peran mereka

dalam proyek yang sedang dilaksanakan kurang jelas karena pengintegrasian proyek yang dikerjakan dengan mata pelajaran yang mereka ampu kurang jelas.

Kendala lainnya yang dirasakan oleh guru adalah mengenai keterbatasan mereka dalam memanfaatkan platform merdeka mengajar. Kendala ini dirasakan secara pribadi oleh guru IPS yang mengajar di kelas 7. Guru tersebut menyampaikan bahwa karena keterbatasan kemampuan matanya dalam mengguanakan peralatan elektronik dalam jangka waktu yang lama membuatnya sulit untuk memaksimalkan penggunaan platform merdeka mengajar. Selain itu, guru tersebut juga menyampaikan bahwa pelatihan, workshop, ataupun seminar mengenai kurikulum merdeka belajar yang dilakukan via zoom ataupun youtube juga tidak bisa diikutinya secara maksimal karena keterbatasan pribadi tadi.

Guru IPS ini juga menjalaskan bahwa kurangnya jumlah jam pelajaran yang ada pada kurikulum merdeka dibandingkan kurikulum 2013. Jam pelajaran yang semula 4 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran, yang semula 3 jam pelajaran menjadi 2 jam pelajaran, dan begitu juga dengan mata pelajaran lainnya yang juga mengalami pengurangan 1 jam pelajaran. Walaupun hal ini dilakukan untuk menyediakan waktu untuk pelaksanaan proyek, tetapi guru masih merasa waktu pembelajaran yang ada kurang untuk melakukan pendalaman dan perluasan materi ajar kepada siswa.

Pembahasan

Salah satu kendala yang dialami oleh SMPN 5 Padang Panjang dan menjadi akar dari berbagai problematika lainnya dalam pengimplementasian kurikulum merdeka adalah kurangnya pendampingan yang maksimal dari pemerintah dalam membimbing lembaga pendidikan, terkhsusnya SMPN 5 Padang Panjang. Kendala ini menjadi akar dari problematika lainnya karena hal ini merupakan hal pokok dan penting dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Akibat dari kurangnya peran pemerintah dalam mendampingi lembaga pendidikan secara aktif dan berkesinambungan membuat kepala sekolah, wakil kurikulum beserta majelis guru dan siswa kewalahan dan kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka.

Kepala SMPN 5 Padang Panjang dan wakil kurikulum menilai perubahan kurikulum yang terjadi terkesan terlalu tergesa-gesa dan kurang matang. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fieka Nurul Arifa yang menjelaskan bahwa perubahan kurikulum yang terkesan tergesa-gesa membuat sekolah terbebani dalam

melaksanakan kurikulum (Arifa, 2022). Hal ini jugalah yang membuat sekolah merasa kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Kendala yang selanjutnya dialami di SMPN 5 Padang Panjang berkaitan panduan pengimplementasian kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah. Panduan pelaksanaan ini berkaitan juga dengan problematika yang pertama, karena kurangnya pendampingan dan pembinaan khusus dari pemerintah kepada lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai permasalahan yang terjadi dalam implementasi kurikulum merdeka di perguruan tinggi berupa belum adanya buku panduan khusus terkait bagaimana cara pengimplementasian kurikulum merdeka yang idealnya (Susetyo, 2020).

Berkaitan dengan panduan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, pemerintah sebenarnya sudah menyiasati dengan mengadakan platform merdeka mengajar yang dapat dipergunakan oleh guru untuk melakukan pembelajaran pada kelas 7 di SMPN 5 Padang Panjang. Akan tetapi, platform ini dirasa belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran pada kurikulum merdeka. Guru tidak bisa hanya berpegangan kepada platform merdeka mengajar saja untuk mengerti dan paham mengenai tata cara melaksanakan pembelajaran yang ideal sesuai tuntutan kurikulum merdeka. Sangat diperlukan adanya panduan khusus beserta penjelasan dalam forum seminar atau workshop berkala dari Kemndikbudristek yang khusus membahas mengenai pengimplementasian kurikulum merdeka pada sekolah. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dan dilengkapi dengan pelatihan tahap per tahap untuk memenuhi kebutuhan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada tiap tahapannya sesuai tuntunan kurikulum merdeka. Pemerintah, terkhsusnya Kemdikbukristek harus lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan lagi pengimplementasian kurikulum merdeka dalam masyarakat (Susetyo, 2020).

Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, asesmen dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran atau awal penerimaan siswa, asesmen formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran, dan asesmen sumatif pada akhir materi pembelajaran, akhir semester, atau akhir fase pendidikan (Anggraena et al., 2022b, 2022a; Sufyadi et al., 2021). Asesmen diagnostik yang dilakukan di SMPN 5 Padang Panjang menjadi salah satu kendala terhadap proses implementasi kurikulum merdeka di sekolah

tersebut. Asesmen diagnostik yang dilaksanakan di SMPN 5 Padang Panjang hanya dilakukan untuk mengukur gaya belajar saja, tetapi tidak untuk kesulitan belajar dan aspek-aspek lainnya. Padahal, tujuan utama asesmen diagnostik dalam kurikulum merdeka adalah untuk mengetahui kesulitan belajar siswa tidak hanya dari gaya belajar mereka saja, tetapi juga dari keadaan psikologi dan mental, lingkungan keluarga, belajar dirumah, serta kehidupan sosial siswa (Nasution, 2021).

Kendala lainnya yang disampaikan oleh wakil kurikulum dan kepala sekolah adalah kendala yang berasal dari majelis guru itu sendiri. Kepala sekolah dan wakil kurikulum SMNP 5 Padang Panjang memandang bahwa guru-guru di sekolah tersebut masih sulit untuk menerima perubahan. Dalam hal ini, guru-guru kesulitan untuk menerima dan menyamakan persepsi mengenai kurikulum merdeka. Mereka tidak bisa merubah mindset mereka menganai pergantian kurikulum karena sudah terlalu nyaman dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Evi Susilowati mengenai guru yang masih terbiasa dengan kebiasaan dan gaya lama yang berlaku pada kurikulum sebelumnya membuat mereka sulit dan berat dalam menerima perubahan kurikulum (Susilowati, 2022).

Selanjutnya dalam melaksanakan proyek, guru mengalami berbagai kendala yang menyebabkan kurang maksimal pekerjaan guru-guru yang bertanggung jawab alam mengampu pelaksanaan proyek. Hal ini dikarenakan kurang jelasnya pembagian kerja diantara mereka. Salah satu guru di SMPN 5 Padang Panjang menjelaskan bahwa dia tidak memahami posisinya dalam pembelajaran berbasis proyek selain mengawasi anak. Hal ini terjadi karena tema pembelajaran proyek yang berbasis profil penguatan pancasila yang telah ditentukan dalam Permendikbukristek tidak seluruhnya relevan dan dapat diintegrasikan dalan seluruh guru yang mengampu mata pelajaran. Hal inilah yang menjadi problematika dalam pengimplementasian kurikulum merdeka.

Pelaksanaan proyek dilaksanakan dengan melibatkan seluruh guru mata pelajaran yang dilaksanakan dalam jangka waktu 20-30% dari jumlah jam pelajaran dalam setahun (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022). Jika guru yang bersangkutan tidak memahami kinerjanya dalam pelaksaan proyek, maka pembelajaran berbasis proyek ini tidak terlaksana secaram aksimal karena kurangnya bimbingan yang diperoleh siswa dari guru pendamping pembelajaran berbasis proyek. Proyek yang dibuat oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek harusnya mampu mengintegrasikan keseluruhan aspek bidang studi mata

pelajaran pada masing-masing fasenya. Namun, tema yang tersedia tidaklah mampu mengayomi seluruh bidnag studi yang dipelajari pada fase tersebut. apalagi jika proyek yang dilakukan pada tema tersebut hanya sesuai dan relevan dengan salah satu dari sekian banyak mata pelajaran. Misalnya proyek yang dilakukan di SMPN 5 Padang Panjang tentang jejak karbon. Hal ini lebih relevan dengan bidang studi IPA karena berhubungan dengan lingkunga dan jejak karbon.

Guru juga merasa kesulitan dalam memanfaatkan platform merdeka mengajar, memanfaatkan teknologi dalam mendalami pemahaman mengenai implementasi kurikulum merdeka belajar, serta memahami berbagai landasan hukum yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Problematika ini dapat timbul karena adanya kendala dalam diri pribadi guru yang kurang mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik, atau karena adanya keadaan yang membuat guru tersebut tidak bisa maksimal dalam menggunakan fasilitas yang dapat menunjang pemahaman terhadap kurikulum merdeka.

Pemanfaatan platform merdeka mengajar menjadi kunci utama dalam memahami pelaksanaan pembelajaran dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Guru dapat mengguanakan platform merdeka mengajar untuk mengakses kebutuhan administratif keguruan serta memperoleh informasi mengenai pelaksanaan proses pembelajaran. Apabila fasilitas yang tersedia tidak dapat dimaksimalkan secara baik, maka implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran tentunya tidak adkan berjalan secara maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan pembimbingan khsus terhadap para guru dalam forum MGMP untuk saling berbagi pengalaman dalam menggunakan platform merdeka mengajar, atau dalam perihal pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi kurikulum merdeka.

Jumlah jam pelajaran juga menjadi kendala yang menyebabkan problematika pada pelaksanaan kurikulum merdeka di SMPN 5 Padnag Panjang. Pada kurikulum merdeka, jumlah jam pelajaran pada kurikulum sebelumnya dikurangi 1 jam pelajaran dan di gunakan untuk pelaksanaan proyek. Hal ini menyebabkan guru merasa kesulitan dalam melakukan pengembangan, pendalaman, dan penginternalisasian nilai-nilai kepada siswa. Hal ini juga dapat menyebabkan guru kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena membutuhkan waktu yang cukup panjang karena kemajemukan kemampuan dan gaya belajar siswa di kelas.

KESIMPULAN

Yang menjadi problematika dalam pengimplementasian kurikulum merdeka di SMPN 5 Padang Panjang berasal dari segala aspek. Ada yang berasal dari aspek diri guru itu sendiri karena keterbatasan kemampuan mereka dalam mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar di SMPN 5 Padang Panjang. Ada juga problematika yang berasal dari sisi pemerintah karena kurang maksimalnya sosialisasi terhadap kurikulum merdeka pada berbagai lembaga pendidikan. Seharusnya, pemerintah lebih menggalakkan sosialisasi mengenai penggunakan kurikulum merdeka dalam pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Nur El-Islam*, *1*, 48–58.

Anggraena, Y. (2022a). *Buku Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Kemendikbudristek RI.

Anggraena, Y. (2022b). *Buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah*. Kemendikbudristek RI.

Aprima, D., & Sari, S. (2022). Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pelajaran Matematika SD. *Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *13*(1), 95–101.

Arifa, F. N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya. *Bidang Kesejahteraan Rakyat: Info Singkat, 14*(9), 25–30.

Efendi, S., Lubis, S. A., & Nasution, W. N. (2018). Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD Negeri 064025 Kecamatan Medan Tuntungan. *Edu Riligia*, *2*(2), 265–275.

Evy Ramadina. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Mozaic Islam Nusantara*, *7*(2), 131–142.

Insani, F. D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, *8*(1), 43–64. https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132

Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *7*(1), 180–193.

Nasution, S. W. (2021). Assesment Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. *Prosding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, *1*(1), 135–142. https://doi.org/10.34007/ppd.v1i1.181

Nuraini, D., Anggraini, L., Misiyanto, & Mulia, K. R. (2022). *Serba-Serbi Kurikulum Merdeka*. Direktorat Sekolah Dasar.

Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, H., & Prihatin. (2021). Jurnal basicedu. *Jurnal Basicedu*, *5*(4), 2541–2549. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230

Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *6*(4), 7174–7187. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431

Sudarto, Hafid, A., & Amran, M. (2021). Analisis Implementasi Program Merdeka Belajar di SDN 24 Macanang dalam Kaitannya dengan Pembelajaran IPA/TemaIPA. *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021*, *1*(1), 406–417. https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/25268

Sufyadi, S. (2021). *Buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen*. Kemendikbudristek RI.

Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, *1*(1), 29–43.

Susilowati, E. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembentukan Karakter Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Journal of Sience Education*, *I*, 115–132.